



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	A-4
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

## Catatan BPK agar Jadi Perhatian

PD. PARIAMAN - Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengikuti video conference penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab 2020 bersama BPK Sumatera Barat, akhir pekan lalu.

Pada kesempatan tersebut pihak BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas sembilan laporan keuangan pemerintah daerah se Sumatera Barat, di antaranya Kabupaten Limapuluh Kota, Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat, dan lainnya.

Untuk Padang Pariaman berhasil mempertahankan WTP yang ke-8 kali. Di harapkan pencapaian ini dapat menjaat motivasi bagi pemerintah daerah lainnya.

Pihak BPK Sumbar kembali menegaskan, jika opini tanpa pengecualian ini menunjukkan komitmen antara DPRD dan manajemen pemerintah daerah, untuk terus mendorong dalam perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang ba

Terlepas dari catatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah BPK masih menemukan permasalahan terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kepala BPK mengatakan, permasalahannya di Padang Pariaman ini terkait dengan penetapan, pemungutan dan pendapatan pajak daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga terdapat kekurangan penerimaan pajak daerah dan juga keterlambatan yang belum dikenakan. Kemudian, terakhir juga terdapat kelebihan pembayaran tunjangan reses dan dana operasional pimpinan di sekretariat DPRD.

Terkait catatan BPK ini, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, menyebutkan bahwa catatan BPK tersebut, ke depan kontan akan menjadi perhatian. (501)